

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain tentu saja hal tersebut di perbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

Dalam praktek sehari-hari tidak jarang kita jumpai pegawai negeri/pejabat/ penyelenggara Negara/ pelayan bangsa yang berharap menerima hadiah dari pelayanan yang mereka berikan. Terkadang pelayanan baru diberikan bila ada uang pelicin atau uang jasa (Arya Maheka, Tth: 20). Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah

dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian jenis ini yang telah membudaya di bidang birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi antar kepentingan.

Pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau pun uang merupakan salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang (Doni Muhariansyah Dkk., 2010: 4).

Gratifikasi mulai dikenal masyarakat sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun Undang-Undang tersebut sudah disahkan sejak kurang lebih 12 tahun lalu, konsep tentang gratifikasi sendiri masih dianggap sebagai sesuatu hal yang baru bagi masyarakat, dan seringkali dianggap sebagai hal yang bertabrakan dengan budaya saling memberi di masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi menjadi perhatian khusus karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. Pengertian gratifikasi terdapat pada penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa,

Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik

yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Apabila dicermati penjelasan pasal 12 B Ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pasal 12 B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur Pasal 12 B saja.

Pasal 12 B menyatakan bahwa “ setiap gratifikasi kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.”

Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu perbuatan pidana suap, khususnya jika pemberian hadiah tersebut diberikan kepada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya dan bertentangan dengan kewajibannya.

Praktik korupsi dalam bentuk gratifikasi atau pemberian hadiah ternyata setua peradaban manusia. Budaya tersebut tidak hanya terjadi pada masa pemerintahan modern seperti saat ini, namun juga dapat ditemukan pada zaman kenabian,

khususnya pada awal perkembangan peradaban Islam. Di suatu kesempatan, sebagaimana di riwayatkan oleh Abu Daud RA (*Sunan Abu Dawud*, Kitab Pajak Kepemimpinan dan *Fai*, bab penjelasan tentang bayaran kepada pekerja No. 2554), bahwa Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Siapa saja yang aku angkat sebagai pekerja dalam suatu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima diluar gajinya adalah harta khianat (ghulul) (Abu Daud, Tth: 135).

Dalam Islam dikenal adanya istilah “*risywah*”, menurut Ibrahim Anis *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar (Nurul Irfan, 2012: 89). Suap, uang pelicin, *money politic* dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai *risywah* apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau membatalkan perbuatan yang hak (Ibn Al-Katsir, Tth: 308). Suap haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak, berdasarkan al-Quran dan keumuman hadits-hadits yang mengharamkan suap.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [02]:188 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَبِيعُونَ سُوءَ مَا عَمِلُوا لِكَيْ لَا يُحْزِنُوا وَأُولَٰئِكَ لَا يَأْمُرُونَ بِالْعَدْلِ وَلَا يُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الرِّشْوَةُ وَالْمُتَكَبِّرُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (Departemen Agama RI, 1971: 46).

Disamping *risywah*/suap ini, di dalam syari'at Islam juga dikenal adanya hadiah. Dari kitab *fathul mu'in* yang di terjemahkan oleh Aliy As'ad hadiah menurut beliau adalah hibah yang pemberiannya dengan cara mengantarkan kepada yang diberi guna untuk memuliakanya (Aliy As'ad, 1979: 328).

Hadiah juga diartikan pemberian sesuatu dengan tujuan memberikan penghargaan atas karya seseorang, mengekspresikan kecintaan agar balik dicintai atau setidaknya bertujuan mendapat pahala. Disamping itu, hadiah juga ada ucapan terima kasih kepada seseorang yang telah berjasa, biasanya diberikan kepada keluarga, teman, tetangga, para ulama atau siapa pun yang dianggap baik.

Dengan demikian, hadiah pada dasarnya adalah sesuatu yang sah dan wajar bahkan dianjurkan oleh syari'at (*sunnah*). Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda: Saling memberi hadiahlah niscaya kau saling menyayangi (Moh.Suri Sudahri, 2010: 254).

Saling memberi hadiah adalah merupakan amal terpuji dan amal saleh yang memiliki nilai positif khususnya dalam membangun semangat kebersamaan dan *ukhwah Islamiyah*, saling membantu dan tolong menolong. Apalagi kalau hadiah itu diberikan kepada para ulama, maka pemberian hadiah itu memiliki nilai lebih karena didasarkan pada kecintaan atau sebagai ekspresi dari rasa *ta'zim* kepada orang yang dihormati, dibanggakan dan diteladani.

Namun dalam realitas kemasyarakatan dewasa ini, suatu pemberian atau hadiah telah tercemari dengan berbagai motivasi bahkan bergeser dari tujuan mulia pemberian atau hadiah itu sendiri, khususnya hadiah yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan, maka tidak mustahil pemberian itu memiliki maksud-maksud tersembunyi karena adanya jabatan yang melekat pada pejabat itu sendiri. Pemberian hadiah dalam konotasi seperti ini maka dilarang dan diharamkan dalam Islam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Rasulullah mengkategorikan dengan *ghulul* atau penghianatan.

Menurut Syamsuddin al-Sarakhsi dalam kitabnya, *Al-Mabsuth*, hadiah hukumnya sunnah jika terkait dengan hak yang tak ada kaitannya dengan salah satu pekerjaan untuk mengurus masyarakat. Jika orang itu diangkat untuk menjalankan urusan negara, seperti para hakim dan kepala daerah, dia harus menolak hadiah, khususnya dari orang yang sebelumnya tak pernah memberikan hadiah kepadanya. Sebab, cara itu bisa memengaruhi keputusan yang seharusnya ia lakukan. Dalam kasus ini, status hukum hadiah itu adalah bentuk suap (*risywah*) dan harta haram

(suht). (<http://alatsar.wordpress.com/2009/07/08hukum-suap-menyuap-ar-risywah>, akses tanggal 26 desember 2009).

Contoh kasus yang bisa digolongkan gratifikasi yang dilarang adalah pemberian tiket perjalanan oleh rekanan kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri atau Keluarganya untuk keperluan dinas atau pribadi secara cuma-cuma. Alasannya adalah pemberian hadiah akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas pejabat tersebut (Doni Muhandiansyah Dkk., 2010: 21).

Dalam kaitannya dengan gratifikasi ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang yang memberikan hadiah (gratifikasi) kepada petugas agar ia melakukan untuknya sesuatu yang tidak diperbolehkan adalah haram bagi pemberi hadiah dan penerimanya karenanya hal ini termasuk suap yang disabdakan oleh Rasulullah : “ Allah mengutuk penyuap dan penerima suap” (Nurul Irfan, 2012: 101).

Dalam kitabnya *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahir-Ra'i war-Ra'iyah*, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hadiah (suatu pemberian) yang diterima oleh pejabat Negara (*Waliyyul Amri*) juga merupakan bentuk penyimpangan dan merupakan suatu *kezaliman*. Beliau mencantumkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (Shahih Al-Bukhari, *Hadaya al-'ummal*: 70, No. 6464) bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ
السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتَيْبَةِ عَلَى

الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدَّمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ
فَيَنْظُرَ أَيُّهُدِي إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُورٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى
رَأَيْنَا غُفْرَةً إِبْطِيهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا

Dari Abi Humaid As Sa'idi ra berkata Nabi saw mengangkat seseorang dari suku Azdy bernama Ibnu Al-Uthbiyyah untuk mengurus zakat, tatkala ia datang kepada Rasulullah, ia berkata: Ini untuk anda dan ini dihadiahkan untuk saya. Rasulullah bersabda, "Kenapa ia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, lantas melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak. Demi Zat yang jiwaku berada ditangan-Nya tidaklah seseorang mengambilnya darinya sesuatupun kecuali ia datang pada hari kiamat dengan memikulnya di lehernya, kalau unta atau sapi atau kambing semua akan bersuara dengan suaranya, kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kelihatan ketiakanya lantas bersabda, Ya Allah tidaklah kecuali telah aku sampaikan, sungguh telah aku sampaikan, sungguh telah aku sampaikan (Rofi' Munawwar, 2005: 60).

Dengan demikian, perlu dilakukan pendalaman mengenai konsep gratifikasi (suatu pemberian) dari sudut pandang agama, terutama memahami hukum hadiah kepada pejabat Negara, serta memahami mengenai konsep gratifikasi sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan sekripsi dengan judul "KRITERIA HARTA GRATIFIKASI YANG DIPEROLEH PEJABAT NEGARA MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah kriteria harta gratifikasi yang diperoleh pejabat negara menurut Ibnu Taimiyah dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah tentang kriteria harta gratifikasi yang diperoleh pejabat negara?
3. Bagaimanakah relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang harta gratifikasi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban permasalahan pada penelitian ini. Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria harta gratifikasi yang diperoleh pejabat Negara menurut Ibnu Taimiyah dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah tentang kriteria harta gratifikasi yang diperoleh pejabat Negara.
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang harta gratifikasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan informasi, kontribusi pemikiran dan menambah khasanah dalam bidang pengetahuan tentang tindak pidana menerima gratifikasi baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Sehingga diharapkan sekripsi ini dapat memperkaya perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan kontribusi dalam sosialisasi tentang tindak pidana korupsi gratifikasi kepada masyarakat dan mahasiswa, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan perannya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Dapat memberikan masukan kepada lembaga-lembaga Negara yang terkait dalam pengambilan kebijakan terhadap tindak pidana korupsi baik eksekutif, legislative dan yudikatif agar dapat diperoleh solusi dalam menangani kasus-kasus korupsi yang timbul.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa hukum tidak hanya apa yang tertulis dalam kitab Undang-Undang, melainkan juga aturan yang hidup yang dipatuhi oleh masyarakat dan pemikiran-pemikiran para ahli yang tertulis dalam buku atau kitab-kitab karya mereka. Hukum yang tertulis dalam Undang-Undang disebut

sebagai *Law Entocement*, sementara hukum yang hidup dalam masyarakat disebut *Living law*. Antara keduanya terdapat korelasi dan dalam pelaksanaannya bisa terjadi kohesi yang saling menguatkan satu sama lain. Sebagai salah satu contoh adalah mengenai hukum pemberian hadiah kepada pejabat Negara yang dikenal dengan gratifikasi. Dalam peraturan Negara, gratifikasi ini diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 tahun 2001 Pasal 12 B, dan oleh salah satu ulama yaitu Ibnu Taimiyah, gratifikasi ini beliau jelaskan dalam kitabnya *al-Fatawa al-Kubra Li Ibn Taimiyyah/ Majmu' Fatawa dan As-Siyasah as- Syar'iyah fi Ishlahir-Ra'i war-Ra'iyah*.

Secara harfiah (*letterlijk*) korupsi adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap dan penyimpangan dari sebagaimana mestinya. Dalam kamus bahasa Indonesia karangan Poerwodarminto, disebutkan: Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya (Moch. Faisal Salam, 2004: 72). Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena jabatan, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga dan golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Pengertian tindak pidana korupsi dengan tegas diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertasan Tindak Pidana korupsi, sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Faisal Salam, 2004: 90).

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi digolongkan ke dalam 7 kelompok atau golongan yang terdiri dari 30 jenis Tindak Pidana Korupsi, salah satunya adalah korupsi yang terkait dengan gratifikasi (Bibit S. Rianto, 2009: 34).

Sementara yang dimaksud dengan gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12 B sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Gratifikasi sebagai Tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam Islam, negara wajib memberikan gaji dan fasilitas layak untuk mencukupi kebutuhan hidup pokok aparat dan keluarganya. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam bab tentang bayaran kepada pekerja, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ

مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا " قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ " مَنْ اخْتَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ أَوْ سَارِقٌ

Barang siapa yang menjadi pegawai kami maka hendaknya ia mencari seorang istri, apabila ia tidak memiliki pembantu maka hendaknya ia mencari pembantu, dan apabila ia tidak memiliki tempat tinggal, maka hendaknya ia mencari tempat tinggal! Abu Bakr berkata; aku diberi kabar bahwa Nabi SAW berkata : barang siapa yang mengambil selain itu, maka ia adalah penghianat atau pencuri (*Sunan Abu Daud*, Tth, Juz 3: 134).

Dalam Islam terdapat istilah “*risywah*” atau “*rasuwah*” yang berarti suap. Ada beberapa pendapat mengenai definisi *risywah* ini, diantaranya menurut al-Sya’rawi mengatakan bahwa *risywah* adalah segala bentuk upaya yang dilakukan bukan dengan cara yang halal (al-Sya’rawi, Tth: 3258).

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmu’ Fatawa/Fatawa al-Kubra li Ibn Taimiyyah*, membahas tentang *risywah* ini dalam bab *Masalah Ahda al-Amira Hadiyyatan li Thalabi Haajatin*. Beliau mendefinisikan *risywah* dengan pemberian hadiah yang diberikan seseorang kepada pejabat atau petugas (*Waliyyul-Amri*) agar ia melakukan untuknya sesuatu yang tidak diperbolehkan atau mengharamkan sesuatu yang diharamkan atau yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah

Risywah atau suap haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak, berdasarkan al-Quran dan keumuman hadits-hadits yang mengharamkan suap. Beberapa *nash* di dalam Al-Quran dan Sabda Rasulullah mengisyaratkan bahkan menegaskan bahwa *risywah* suatu yang diharamkan di dalam syariat, bahkan termasuk dosa besar. Sebagaimana firman Allah Q.S. al-Baqarah [02]:188, sebagai berikut:

[illegible]

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (Departemen Agama RI, 1971: 46).

Q.S. al-Maidah [5]:42

◆♠→☑⌚📄📖 ⚡☹️⚡0♦☑♣♢ 🌀🌀♣☐↪⌚🕒😊☒

📄♣♣☀️↔️4○☑♣♢ 🌀

Q.S. an-Nisa [4]: 29















































































































Ibnu Katsir dalam tafsirnya bab ke 41, mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa ma'na “*akkaluuna lisshuht*” yaitu *risywah*, karena *risywah* identik dengan memakan harta yang diharamkan Allah (Ibnu Katsir, Juz 3:117).

Q.S. an-Nisa [4]: 29

[illegible]

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Departemen Agama RI, 1971: 122).

Q.S.Ali Imran [3]:161

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya". (Departemen Agama RI, 1971: 104).

وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (كُلُّ حِمٍّ نَبَتْ بِالسُّحْتِ فَالْتَّارُ أَوَّلَى بِهِ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السُّحْتُ؟ قَالَ: (الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ). وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: السُّحْتُ أَنْ يَفْضِيَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ حَاجَةً فَيُهْدِيَ إِلَيْهِ هَدِيَّةً فَيَقْبَلَهَا

Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram (*Al-shuht*), nerakalah yang paling layak untuknya. Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apa barang haram yang di maksud itu?” Rasulullah bersabda: “Suap dalam perkara hukum.” dari Ibnu Mas’ud berkata: “Perbuatan *Shuht* adalah seseorang menyelesaikan hajat saudaranya maka orang tersebut memberikan hadiah kepadanya lalu dia menerimanya (Al-Quthubi, Tth, Juz 6:183, Maktabah Syamilah).

Hadits selanjutnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abi Daud, Ibnu Majah, al-Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya, bab *Musnad Abu Bakr As Siddik*, Hadits No. 6689 bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap (Ahmad bin Hanbal, juz 11: 565, Lidwa Pusaka).

Selain istilah suap ini, di dalam Islam juga dikenal adanya istilah “hadiah” Hadiah adalah pemberian yang diberikan secara cuma-cuma tanpa imbalan. Menurut istilah *syar’i*, maka hadiah ialah menyerahkan suatu benda kepada seorang tertentu agar terwujudnya hubungan baik dan mendapatkan pahala dari Allah tanpa adanya permintaan dan syarat (<http://fadhlihsan.wordpress.com> diakses 30/09/2013 jam 11:32 pm).

Dengan demikian, hadiah pada dasarnya adalah sesuatu yang sah dan wajar bahkan dianjurkan oleh syari'at (sunnah), sekalipun pemberian itu menurut pandangan yang memberi-sesuatu yang remeh, berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Shahih*-nya, *al-Bukhari, bab Kitab al Hibah Wa Fadlilhaa*, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً جَارَتَهَا، وَلَوْ فَرَسَنَ شَاةٍ

Wahai wanita muslimah janganlah kalian menganggap remeh pemberian seorang tetangga kepada tetangganya, sekalipun ujung kaki kambing (Imam Bukhari, juz 3: 153, Lidwa Pusaka).

Hadits lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Adabul Mufrad* bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda: Saling memberi hadiahlah niscaya kau saling menyayangi (Moh.Suri Sudahri, 2010: 254).

Menurut Syamsuddin al-Sarakhsi dalam kitabnya, *Al-Mabsuth*, hadiah hukumnya sunnah jika terkait dengan hak yang tak ada kaitannya dengan salah satu pekerjaan untuk mengurus masyarakat. Jika orang itu diangkat untuk menjalankan urusan negara, seperti para hakim dan kepala daerah, dia harus menolak hadiah, khususnya dari orang yang sebelumnya tak pernah memberikan hadiah kepadanya. Sebab, cara itu bisa memengaruhi keputusan yang seharusnya ia lakukan. Dalam kasus ini, status hukum hadiah itu adalah bentuk suap (*risywah*) dan harta haram

(suht). (<http://alatsar.wordpress.com/2009/07/08hukum-suap-menyuap-ar-risywah>, akses tanggal 26 Desember 2009).

Banyak dalil-dalil syariah yang menegaskan haramnya pegawai menerima hadiah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA bahwa Nabi SAW bersabda,

هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ

Hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pemimpin adalah harta ghulul/ penyimpangan/khianat (Rofi Munawwar, 2012: 59).

Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud RA (*Sunan Abu Dawud*, Kitab Pajak Kepemimpinan dan *Fai*, bab Penjelasan tentang bayaran kepada pekerja No. 2554), bahwa Nabi SAW bersabda:

عن النبي صلى الله عليه و سلم قال " مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ

ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Siapa saja yang aku angkat sebagai pekerja dalam suatu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima diluar gajinya adalah harta khianat (ghulul).

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (*Shahih Muslim*, bab haramnya petugas menerima hadiah, Hdits No. 3415) bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكُتِمْنَا مَخِطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ،

قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْبَلْ عَنِّي

عَمَلَك، قَالَ: «وَمَا لَكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذًا وَكَذَا قَالَ: " وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ: وَمَنْ

اسْتَعْمَلَنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَحَدٌ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ أَنْتَهَى

Barang siapa diantara kalian yang aku angkat atas suatu amal, kemudian dia menyembunyikan dari kami (meskipun) sebuah jarum, atau sesuatu yang lebih kecil dari itu, maka itu adalah *ghulul* (pencurian) yang pada hari kiamat akan dibawa. Dan dia (Adi bin Amirah) berkata: kemudian seorang laki-laki hitam dari Anshar –sepertinya saya telah melihatnya- berdiri sambil berkata: “wahai Rasulullah, kalau begitu saya akan tarik kembali tugas yang pernah anda bebaskan kepada saya!” beliau balik bertanya : “ada apa denganmu?” dia menjawab, “saya pernah mendengar bahwa anda bersabda seperti ini.” Beliau bersabda:” sekarang saya sampaikan, bahwa barang siapa diantara kalian yang aku tugasi atas suatu amal hendaklah ia datang baik dengan sedikit maupun banyaknya, apa yang memang diberikan untuknya ia boleh mengambilnya, dan apa yang memang dilarang untuknya, maka ia harus dapat menahan diri (Imam Muslim, Tth.:129, Lidwa Pusaka).

Mengenai pemberian hadiah atau hibah yang diberikan oleh seseorang kepada pejabat pemerintah atau penguasa, ataupun hakim ini, maka dalam hal ini Imam al-Bukhari meriwayatkan hadits dari Abu Humaid al-Saidi dalam hadits yang *masyhur* dengan istilah Hadits Ibnul Utbiyah Hadits No. 6464, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيِّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدَّمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُحَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيَعَّرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى
رَأَيْنَا غُفْرَةً إِبْطِيئِهِ أَلَلَّهُمْ هَلْ بَلَغْتُ أَلَلَّهُمْ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا

(Ibn Taimiyah, 1951: 49-50)

Dari Abi Humaid al-Sa'idi (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW mengangkat seorang lelaki dari suku al-Azd bernama Ibnu al-Uthbiyyah untuk menjadi pejabat pemungut zakat di Bani Sulaim. Ketika ia datang (menghadap Rasulullah untuk melaporkan hasil pemungutan zakat), beliau memeriksanya. Ia berkata: ini harta zakatmu (Rasulullah/Negara) dan yang ini adalah hadiah (yang diberikan kepadaku). Lalu Rasulullah bersabda: jika memang kamu benar maka apakah kalau kamu duduk di rumah ayahmu atau di rumah ibumu hadiah itu datang kepadamu? Kemudian Rasulullah SAW berpidato menggunakan Tahmid dan memuji Allah lalu berkata: Selanjutnya saya mengangkat seseorang diantaramu untuk melakukan suatu tugas yang merupakan bagian dari apa yang telah dibebankan Allah kepadaku. Lalu orang tersebut datang dan berkata : ini hartamu (Rasulullah/Negara) dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Jika ia memang benar maka apakah kalau ia duduk saja di rumah ayah dan ibunya hadiah itu juga datang kepadanya? Demi Allah, begitu seseorang mengambil sesuatu dari hadiah tanpa hak maka nanti di hari kiamat ia akan menemui Allah dengan membawa hadiah (yang diambilnya itu), lalu saya akan mengenali seseorang dari kamu ketika menemui Allah itu, ia memikul di atas pundaknya unta (yang dahulu diambilnya) melengkik atau sapi melenguh atau kambing mengembik. (Nurul Irfan, 2012: 86).

Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *sadd al-dzari'ah* yaitu melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemashlahatan menuju pada suatu kerusakan (*kemafadatan*) (Rahmat Syafe'i, 2010: 132). Metode *sadd al-dzari'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif, atau menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Penulis berpendapat bahwa

metode ini bisa digunakan untuk menetapkan hukum memeberikan hadiah kepada pejabat ini. Di antara kaedah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-dzari'ah* adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (masalahah) (Drs. H. Abdul Mudjib, 2010: 10).

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian lazim disebut sebagai prosedur penelitian dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode yang Digunakan

Agar tujuan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, dalam penulisan skripsi ini dipergunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Alasan penggunaan metode ini adalah karena objek penelitian yang penulis lakukan adalah berupa penelitian perundang-undangan dan nilai-nilai ajaran Islam yang berhubungan dengan gratifikasi.

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan kepada peraturan-peraturan yang tertulis, doktrin ulama dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut

sebagai penelitian kepustakaan ataupun study dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan komparatif, karena dalam penelitian ini mencoba membandingkan antara pandangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pendapat Ibnu Taimiyah tentang harta gratifikasi.

2. Sumber Data

Bahan hukum *Library Research*, mengacu pada 2 bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu kitab *al-Siyasah al-Syar'iyah, Majmu' Fatawa/ Fatawa al-Kubra Li Ibn Taimiyyah* karya Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang yang berkaitan dengan judul skripsi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu pendukung lain misalnya, kitab-kitab, buku-buku, majalah, artikel kamus dan internet yang berkaitan dengan judul sekripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis mencari informasi, mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang di bahas dalam sekripsi ini. Informasi tersebut penulis peroleh dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab-kitab, fatwa-

fatwa ulama, internet, dan buku-buku yang membahas mengenai gratifikasi, *risywah* (suap), dan Hadiah, serta pendapat-pendapat dari ahli hukum.

4. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah data dikumpulkan maka analisa data dalam penulisan ini bersifat kualitatif. Adapun metode analisa data yang dipilih adalah model analisa interaktif (Sugiono, 2012: 247).

Di dalam model analisa ini terdapat tiga komponen pokok berupa:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah sajian analisa suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data. Dari penyajian data yang terorganisir akan dimengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan penyajian data tersebut.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan yaitu kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Adapun proses analisisnya adalah sebagai berikut: Langkah pertama adalah pengumpulan data, setelah data terkumpul kemudian direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data, yaitu rakitan organisasi informasi data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan.

